

KEKUATAN PEMBUKTIAN BEDAH MAYAT YANG DILAKUKAN SECARA PARSIAL DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya kekeliruan pemahaman terkait praktik bedah mayat parsial pada proses pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana. Dalam suatu kasus, termasuk perkara yang menjadi sorotan publik, pengambilan sampel organ tertentu kerap diasumsikan sebagai bentuk bedah mayat parsial, padahal istilah dan prosedur tersebut tidak dikenal dalam kerangka hukum Indonesia. Hal ini menimbulkan persoalan mengenai keabsahan tindakan tersebut serta implikasinya terhadap kekuatan pembuktian di persidangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta interpretasi gramatikal dan sistematis. Analisis dilakukan melalui penafsiran norma untuk menilai kesesuaian tindakan pengambilan sampel organ dengan ketentuan forensik dan hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur bedah mayat forensik di Indonesia wajib mencakup pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam secara komprehensif. Tidak terdapat dasar hukum yang mengakui keberadaan bedah mayat parsial, sehingga pengambilan sampel organ tanpa pemeriksaan menyeluruh tidak memenuhi standar forensik maupun ketentuan peraturan perundang-undangan. Tindakan tersebut juga tidak memberikan kepastian ilmiah mengenai penyebab kematian. Temuan ini menegaskan bahwa hasil pemeriksaan yang tidak sesuai prosedur tidak memiliki kekuatan pembuktian yang memadai dan berpotensi menimbulkan kekeliruan dalam proses peradilan. Oleh karena itu, pemahaman aparat penegak hukum mengenai regulasi bedah mayat harus diperkuat agar pembuktian dalam perkara pembunuhan berencana dapat memenuhi asas kepastian hukum, keadilan, dan akurasi ilmiah.

Kata kunci: bedah mayat, parsial, pembuktian.

THE EVIDENTIARY POWER OF A PARTIAL AUTOPSY IN THE CRIME OF PREMEDITATED MURDER

ABSTRACT

This research is motivated by the emergence of misconceptions regarding the practice of partial autopsy in the evidentiary process of premeditated murder cases. In several instances, including cases that have gained public attention, the collection of specific organ samples is often assumed to constitute a form of partial autopsy, even though such terminology and procedures are not recognized within Indonesia's legal framework. This misconception raises questions concerning the legality of such actions and their implications for evidentiary strength in court proceedings. This study employs a normative juridical method with statutory, conceptual, grammatical, and systematic approaches. The analysis is conducted through normative interpretation to assess the conformity of organ sample collection with forensic standards and positive legal provisions. The findings show that forensic autopsy procedures in Indonesia must encompass both external and internal examinations comprehensively. There is no legal basis recognizing the existence of partial autopsy, making the collection of organ samples without a full examination inconsistent with forensic standards and statutory regulations. Such actions also fail to provide scientific certainty regarding the cause of death. These findings affirm that examinations conducted outside procedural requirements lack adequate evidentiary value and may lead to errors in judicial processes. Therefore, the understanding of law enforcement personnel regarding autopsy regulations must be strengthened to ensure that evidentiary processes in premeditated murder cases fulfill the principles of legal certainty, justice, and scientific accuracy.

Keywords: autopsy, partial, evidence.